

No. 34, Februari 2007

ISSN 1410-895X

ARAH REFORMASI INDONESIA

Teknologi, Sejarah, dan Sosial

**Refrigeran Pengganti Freon
yang Ramah Lingkungan**

P.K. Purwadi

**Membangun
Kriteria Rekonstruksi Sejarah**

H. Purwanta

Otonomi Daerah dan Masalahnya

A. Kardiyat Wiharyanto



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

ARAH REFORMASI INDONESIA

Teknologi, Sejarah, dan Sosial

DEWAN REDAKSI

Pelindung:

Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J.
Rektor Universitas Sanata Dharma

Penasihat:

Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.
Wakil Rektor I Universitas Sanata Dharma

Pemimpin Redaksi:

Dr. I. Praptomo Baryadi, M.Hum.
Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma

Sekretaris Redaksi:

S.E. Peni Adji, S.S., M.Hum
Kepala Pusat Penerbitan dan Bookshop Universitas Sanata Dharma

Anggota Redaksi:

Drs. H. Wahyudi, M.Si., Aris Widayati, M.Si., Apt., Dr. T. Priyo W, M.Si.,
Dr. Susento, M.S., Dr. J.J. Spillane, S.J., Drs. H. Purwanta, M.A.,
A. Rita Widiarti, S.Si., M.Kom., Drs. S.R.L. Aji Sampurno, M.Hum.

Administrasi/Sirkulasi:

Agnes Sri Puji Wahyuni, Bsc.
Maria Imaculata Rini Hendriningsih, S.E.
Thomas A. Hermawan Martanto, Amd.

Alamat Redaksi:

LPPM SADHAR
Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002
Telepon: (0274) 513301, 515352, ext. 527
Fax: (0274) 562383.

E-mail: lemilit@staff.usd.ac.id

Redaksi terbuka untuk menerima tulisan dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan religi dari pembaca. Tulisan ditulis berdasarkan disiplin ilmu masing-masing sehingga mempunyai landasan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tulisan diketik pada kertas kuarto dengan dua spasi, antara 15 - 20 halaman, dan dikirim ke alamat redaksi.

KATA PENGANTAR

Dilihat dari sisi kehidupan manusia, teknologi dapat diandaikan sebagai pedang bermata dua. Pada satu sisi, teknologi – sebagaimana motivasi awal penciptaannya – dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kerja manusia. Dengan bantuan teknologi, manusia bekerja lebih ringan sekaligus produktivitasnya lebih tinggi. Pada sisi lain, secara tidak disadari teknologi dapat pula mengancam kehidupan manusia. Salah satu contohnya, sebagaimana diuraikan pada artikel yang berjudul “Refrigeran Pengganti Freon yang Ramah Lingkungan” yang ditulis oleh PK Purwadi, adalah penggunaan freon sebagai fluida kerja mesin pendingin (*kulkas, freezer, cold storage, dispenser, AC*). Teknologi ini penggunaannya telah begitu dekat dan menyatu dengan kehidupan masyarakat sehingga dengan demikian tentu telah pula dirasakan memberikan kebermanfaatannya yang tidak kecil bagi kehidupan manusia. Namun pada sisi lain, tidak disadari bahwa freon juga mengancam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan freon mempunyai kemampuan membuat “lubang” ozon. Dengan adanya lubang ozon, sinar ultraviolet dapat langsung ke permukaan bumi sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia; menimbulkan berbagai macam penyakit seperti katarak mata, kanker kulit, penurunan daya tahan tubuh, dan sebagainya. Selain itu, freon juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan: suhu di bumi naik, iklim dan cuaca ikut berubah, rantai makanan di laut terusik dan terjadi percepatan kerusakan bahan alam maupun sintetik. Selain berpotensi merusak lapisan ozon, freon juga mempunyai potensi menimbulkan pemanasan global yang tinggi.

Persoalannya adalah penggunaan freon telah terlanjur menyatu dengan masyarakat dan masyarakat belum mengetahui teknologi alternatif yang lain. Untuk menanggulangi bahaya yang mengancam kehidupan manusia itu, melenyapkan freon dari muka bumi ini tidaklah

mudah. Salah satu cara yang dapat ditempuh, sebagaimana dipaparkan oleh PK Purwadi, adalah menciptakan refrigeran baru yang "ramah lingkungan" sebagai pengganti freon dan kemudian menginformasikannya kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penggunaan freon semakin terminimalisasikan.

Pada Jurnal *Arah Reformasi Indonesia* (ARI) nomor 34 ini juga disajikan artikel yang berjudul "Membangun Kriteria Rekonstruksi Sejarah" yang ditulis oleh H. Purwanto. Dalam artikel yang kedua tersebut dikemukakan bahwa sejarawan secara proporsional memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan masa lampau. Namun, berdasarkan hasil kajian penulis, dari berbagai gagasan tentang pertanggungjawaban sejarawan terhadap hasil rekonstruksi yang tertuang akhir-akhir ini, tampaknya belum ada standar yang baku dan disepakati oleh sejarawan Indonesia tentang kriteria yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Penulis secara kritis mengulas kriteria pertanggungjawaban yang diajukan oleh beberapa sejarawan Indonesia, kemudian menyampaikan beberapa kriteria alternatif dalam rangka menggagas bagaimana sejarah dapat berperan sebagai panduan yang efektif dan inspiratif bagi masyarakat masa kini dalam meraih kemajuan.

Akhirnya, pada jurnal ARI edisi ini disajikan artikel yang berjudul "Otonomi Daerah dan Masalahnya" yang ditulis oleh A. Kardiyat Wiharyanto. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa bangsa Indonesia telah menyelenggarakan Otonomi Daerah, namun kenyataannya masih menimbulkan berbagai kontroversi, beda penafsiran dan pelaksanaan. Ada yang berpikir sebagai suatu kesempatan mengapling, mengatur sendiri sebebas-bebasnya atau memisahkan diri dari Pemerintahan Pusat. Pertanyaannya, "Mengapa pelaksanaan Otonomi Daerah itu masih mengundang kontroversi?" Uraian dalam artikel ini mengemukakan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Selamat membaca!

Redaksi

I. Praptomo Baryadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
1. REFRIGERAN PENGGANTI FREON YANG RAMAH LINGKUNGAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Refrigeran 134a	3
1.3 Refrigeran Petrozon	5
1.4 Refrigeran Musicool	7
1.5 Refrigeran Hycool	9
1.6 Refrigeran CO ₂	10
1.7 Penutup	14
Daftar Pustaka	15
2. MEMBANGUN KRITERIA REKONSTRUKSI SEJARAH	17
2.1 Pentingnya Kriteria	17
2.2 Alternatif Kriteria	18
2.3 Meninjau Kritik terhadap Historiografi Indonesia	25
Catatan	32
3. OTONOMI DAERAH DAN MASALAHNYA	35
3.1 Latar Belakang Otonomi Daerah	36
3.2 Konsekuensi dari Otonomi Daerah	37
3.3 Masalah-masalah yang Kontroversi	39
3.4 Kekuatan dan Peluang	40
3.5 Kelemahan dan Ancaman	40
Daftar Pustaka	42
Catatan	43

BIOGRAFI PENULIS

Ir. P.K. Purwadi, M.T. staf pengajar pada Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Drs. H. Purwanta, M.A. staf pengajar pada Program Studi Sastra Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M. staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

MEMBANGUN KRITERIA REKONSTRUKSI SEJARAH

H. Purwanta

2.1 Pentingnya Kriteria

Sejarawan secara profesional memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan masa lampau. Dari berbagai gagasan tentang pertanggungjawaban sejarawan terhadap hasil rekonstruksi yang tertuang akhir-akhir ini, tampaknya belum ada standard yang baku dan disepakati oleh sejarawan Indonesia tentang kriteria yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Bambang Purwanto memberikan unsur-unsur manusiawi, mudah dipahami, menyenangkan dan bermakna sebagai kriteria hasil rekonstruksi sejarah yang baik. Akan tetapi, ketika membahas berbagai kelemahan yang terdapat dalam historiografi Indonesia, dia tidak menggunakan kriteria tersebut sebagai alat ukur. Dari kritiknya bahwa historiografi Indonesia dewasa ini terjebak pada simplifikasi fenomena historis dan semakin menjauh dari sejarah obyektif, tampaknya obyektivitas dijadikan ukuran untuk menilai apakah suatu hasil rekonstruksi sejarah itu baik, kurang baik atau buruk.¹

Berbeda dengan Bambang Purwanto, Asvi Warman Adam mengkritik bahwa historiografi Indonesia, terutama sejarah nasionalnya, bersifat monolitik dan hanya memuat eksplanasi sang pemenang. Oleh karena itu, dia mengajukan usul untuk menempatkan keberagaman dan keberimbangan sebagai kriteria utama historiografi yang baik.² Keberagaman dalam konteks ini adalah bahwa sejarah nasional Indonesia sudah seharusnya menggambarkan berbagai etnis dan kekuatan yang ada di Indonesia. Dalam kritiknya, Asvi menunjukkan etnis Tionghoa sebagai kelompok masyarakat Indonesia

yang memberi sumbangan besar terhadap peradaban Indonesia, tetapi tidak dimasukkan dalam sejarah nasional. Selain keberagaman, keberimbangan juga diusulkan menjadi kriteria. Dalam konteks ini, “sejarah korban” yang digelutinya menjadi alternatif untuk menyeimbangkan eksplanasi sejarah nasional.

Dari pandangan dua sejarawan yang akhir-akhir ini banyak memperbincangkan keburaman sejarah Indonesia, tampak bahwa keduanya memiliki titik pijakan berbeda dalam melihat historiografi Indonesia. Bambang Purwanto mempertanyakan tingkat kebenaran eksplanasi, sedang Asvi menyoroti aspek kelengkapan eksplanasi sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional sejarawan. Keberbedaan tersebut sah, karena memang tidak ada atau belum ada kriteria penilaian yang disepakati di antara para sejarawan Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tidak lucu apabila antar keduanya terlibat “perang”, kecuali untuk sensasi sesaat.

Ketiadaan standar baku yang disepakati secara profesional oleh sejarawan, menjadikan siapapun tidak mungkin melakukan evaluasi dengan hasil penilaian yang dapat diterima oleh umum secara rasional. Meskipun barangkali di antara para sejarawan nasional terdapat kesamaan pandangan bahwa wajah sejarah Indonesia carut marut, tetapi dapat dipastikan bahwa alasan masing-masing akan memiliki perbedaan yang cukup jauh, untuk tidak mengatakan bertolak belakang.

Kebutuhan akan kriteria yang diterima secara rasional oleh semua sejarawan mendesak untuk dipenuhi. Dengan kriteria tersebut, sejarawan dapat menggunakannya sebagai alat evaluasi dan refleksi diri tentang kerja profesional yang telah diperbuatnya selama periode waktu tertentu. Berdasar hasil evaluasi yang telah dilakukan, sejarawan juga dapat merencanakan pengembangan ke depan.

2.2 Alternatif Kriteria

Rekonstruksi sejarah seperti pada umumnya sistem kerja profesional, dapat dievaluasi secara obyektif. Kriteria untuk menilai hasil suatu pekerjaan terutama adalah dari aspek pencapaian tujuan. Alasannya cukup sederhana, yaitu bahwa setiap tindakan manusia tentu memiliki tujuan. Ketika orang merasa haus dan meminum

segelas air, dalam dirinya tentu memiliki harapan agar air tersebut dapat menghilangkan rasa haus. Dengan contoh ini, kiranya mudah dipahami bahwa untuk menilai apakah tindakan tersebut berhasil atau gagal, ukuran yang digunakan adalah penghilangan rasa haus sebagai pencapaian tujuan tindakan.

Apabila ditarik pada kasus usaha rekonstruksi sejarah yang dilakukan oleh para sejarawan, baik profesional maupun amatir, apa tujuan usaha itu? Apa motivasi di balik kerja keras seorang sejarawan yang sehari-hari, bahkan bertahun-tahun, bergulat dengan sumber-sumber primer dan sekunder? Secara profesional tentu usaha keras tersebut dalam rangka menjelaskan peristiwa sejarah. Sampai pada titik ini, tampak bahwa penjelasan fenomena historis yang terjadi di masa lampau menjadi tujuan. Akan tetapi, apabila pertanyaan dilanjutkan pada satu tingkat lebih mendalam, yaitu untuk apa peristiwa sejarah itu dijelaskan kita akan sampai pada sasaran mendasar dari rekonstruksi sejarah. Paling tidak ada tiga sasaran yang hendak dicapai oleh sebuah rekonstruksi sejarah, yaitu kultural sosial dan ilmiah.

2.2.1 Kultural

Setiap masyarakat, oleh karena kekhasan lingkungan fisik dan sosial serta keunikan pengalaman hidup, memiliki dan mengembangkan sistem kehidupan yang khas atau unik. Meskipun tinggal di pulau yang sama, orang Jawa Barat mengembangkan sistem kehidupan yang berbeda dengan masyarakat Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Keunikan sistem kehidupan itulah yang disebut sebagai identitas kultural. Dalam bahasa Ki Hadjar Dewantara, keunikan tersebut merupakan kodrat alam.

Salah satu sifat kebudayaan adalah subyektif, yaitu bahwa masyarakat pendukung suatu kebudayaan akan meyakini sebagai sistem kehidupan yang terbaik bagi mereka. Pemahaman itu secara alamiah muncul sebagai kesimpulan terhadap tumpukan pengalaman dan pengetahuan yang dikumpulkan dari generasi ke generasi. Sebagai contoh, menyesuaikan perilaku manusia terhadap alam dipandang oleh masyarakat Indonesia merupakan keutamaan, karena ditempatkan sebagai manifestasi tanggungjawab manusia untuk menjaga harmoni semesta. Keutamaan itu pada masyarakat Jawa

terkristalisasi dengan ungkapan *mamahayu hayuning bawana* atau menjaga keindahan dan kedamaian semesta. Untuk mencapai keutamaan itu, masyarakat Indonesia menemukan metode yang khas, yaitu dengan melakukan mati raga dan hidup sederhana.

Dalam setiap masyarakat terdapat keutamaan-keutamaan yang menjadi ciri khas atau identitas kultural. Sartono Kartodirdjo menjelaskan identitas individu sebagai berikut:

... identitas adalah masalah kebutuhan dasar manusia. Tanpa identitas, sukar bahkan mustahil melakukan komunikasi dalam masyarakat. Identitas mendefinisikan status dan peran seseorang, mencakup ciri-ciri pokok seseorang baik yang fisik maupun sosial-budaya... Jika seseorang kehilangan memori, antara lain karena senilitas atau penyakit syaraf, timbullah pada dirinya kekacauan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kecuali tidak mampu mengenal identitas dirinya sendiri, dia juga tidak dapat menentukan identitas orang lain. Akibatnya ialah miskomunikasi terus menerus.³

Dari penjelasan tentang identitas individu tersebut kiranya terdapat kesejajaran pemahaman bahwa identitas kultural merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan sangat menentukan status dan peran dalam kehidupan. Dinamika yang berlangsung sepanjang sejarahnya merupakan usaha, baik dilakukan secara individu maupun kelompok, untuk mewujudkan keutamaan-keutamaan tersebut dalam kehidupan nyata. Sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya dibangun oleh masyarakat untuk mewujudkan keutamaan hidup mereka. Dengan kata lain berbagai aspek kehidupan, baik berupa norma, institusi maupun prasarana fisik dapat dirunut akarnya pada keutamaan hidup yang dijadikan identitas kolektif.

Dalam rangka mempertahankan identitas kolektifnya, masyarakat menciptakan dan menggunakan berbagai cara, seperti penciptaan etika sosial dan sistem pendidikan dalam arti luas. Eksplanasi sejarah oleh hampir semua masyarakat di muka bumi ini ditempatkan sebagai salah satu media yang efektif untuk mempertahankan identitasnya. Melalui eksplanasi sejarah yang dilakukan, diharapkan generasi baru menjadi memahami siapa diri mereka dan kemana hidup harus diarahkan. Melalui rekonstruksi sejarah diharapkan generasi baru

belajar berbagai keutamaan yang dijadikan landasan untuk mengarungi dan memaknai kehidupan masa kini dan mendatang.

Salah satu contoh bagaimana masyarakat menghidupi identitasnya dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Wotgaleh, meski saat ini kampungnya tergusur oleh pembangunan lapangan udara Maguwo (sekarang bandara Adisucipto). Mereka mengidentifikasi diri sebagai “tukang berkelahi”. Identitas tersebut berakar dari keyakinan bahwa mereka merupakan pengikut setia Pangeran Purboyo, panglima perang sakti kerajaan Mataram dan pemilik perdikan Wotgaleh, yang tidak pernah mengenal rasa takut untuk membela kebenaran. Masyarakat Wotgaleh menghidupi identitas kolektifnya dengan membuat eksplanasi sejarah tentang kehebatan Pangeran Purboyo yang disampaikan kepada generasi muda melalui pertemuan rutin di Masjid Sulthoni. Identitas tersebut sampai sekarang tetap dihidupi, sehingga generasi baru mereka mewarisi sikap pantang menyerah untuk meminta kembalinya kampung Wotgaleh yang sekarang telah menjadi milik Adisucipto.

Hal yang sama juga dilakukan oleh bangsa Eropa ketika membuat eksplanasi sejarahnya:

Why all the emphasis on the Greeks? It is because the Greeks were the first people in ancient times who thought and acted much like us. They displayed a keen intellectual curiosity, which led to speculation on almost every subject. They also had a strong individualistic spirit, and would not accept any law, rule or fact just because somebody.⁴

Salah satu sifat identitas kolektif adalah unik, sehingga model eksplanasi sejarah pun bersifat unik. Masyarakat yang menempatkan individualisme, rasionalisme dan empirisme sebagai keutamaan akan memiliki model eksplanasi sejarah yang berbeda dengan masyarakat yang menempatkan kekerabatan dan keselarasan sebagai keutamaan. Perbedaan model eksplanasi juga dapat disimak pada masyarakat tulis dan masyarakat lisan. Pada masyarakat berbudaya tulis, orang cenderung lebih mempercayai eksplanasi dan sumber yang berbentuk tulisan dari pada lisan. Sebagai gambaran adalah perkembangan ilmu sejarah. Pencarian sumber primer tertulis, seperti dokumen, catatan harian dan sebagainya, menjadi bagian yang sangat penting dalam

ilmu sejarah. Tersendatnya perkembangan sejarah lisan di lain pihak merupakan manifestasi dari kekurangpercayaan terhadap sumber lisan.⁵

Sebaliknya, pada masyarakat berbudaya lisan, orang lebih mempercayai ucapan lisan daripada tulisan. Indonesia yang pada awalnya sebagai masyarakat yang berbudaya lisan, secara turun-temurun melakukan eksplanasi sejarah secara lisan. Masyarakat dengan tekun mendengarkan tetua yang mengkisahkan riwayat cikal bakal kampung mereka saat dilakukan upacara ruwahan. Bagi anggota masyarakat yang segenerasi atau satu dua tingkat di bawah cikal bakal akan dapat secara lebih detil mengingat berbagai peristiwa yang dikisahkan oleh tetua kampung. Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu dan pergantian sejumlah generasi, ingatan akan peristiwa detil menipis dan tergantikan oleh ingatan tentang peristiwa secara global dan akhirnya yang tertinggal adalah ingatan tentang nilai dari sebuah peristiwa yang dikisahkan. Pada tahap ini, fenomena historis yang dijelaskan sangat mungkin berubah bentuk menjadi cerita rakyat atau legenda yang tidak jarang dibumbui dengan proses mistifikasi.

Meskipun terdapat perbedaan model eksplanasi sejarah antar kebudayaan, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewariskan identitas kultural. Dari perspektif ini, eksplanasi sejarah akan dipandang baik oleh masyarakat apabila mampu menjadi media pewarisan identitas kolektif mereka. Eksplanasi sejarah yang mampu menjadikan generasi baru bangga terhadap kebudayaan dan menjadi bagian dari masyarakat dimana mereka tinggal.

2.2.2 Sosial

Selain memiliki sasaran kultural, eksplanasi sejarah juga memiliki sasaran untuk menjaga kohesivitas sosial kontemporer. Dalam rangka mencapai cita-cita kolektif, masyarakat menghadapi berbagai permasalahan, baik berupa persaingan, konflik maupun perang, yang tidak jarang mengancam kepaduan kehidupan mereka sebagai komunitas. Untuk memperoleh solusi yang tepat, masyarakat akan bertanya kepada sejarah. Dalam konteks ini, eksplanasi sejarah sudah seharusnya mampu menyumbang solusi terhadap problem aktual yang sedang dihadapi. Sejarah dikodratkan menjadi gedung arsip bagi

semua permasalahan yang pernah dialami oleh manusia. Oleh karena itu, melalui koleksinya sejarah memiliki tanggungjawab untuk memberikan eksplanasi berbagai permasalahan yang memiliki relevansi tinggi terhadap problem aktual, sehingga masyarakat mampu mengambil langkah yang tepat dalam usaha mengembalikan kohesivitas sosialnya.

Salah satu usaha untuk menjadikan eksplanasi sejarah sebagai sumber solusi bagi problem aktual masyarakat adalah tulisan Sartono Kartodirdjo saat menanggapi gejolak masyarakat di Way Jepara, Talangsari, Lampung. Dengan membahas gerakan protes petani akhir abad XIX dan awal abad XX, dia berusaha menyatakan bahwa terdapat kemiripan pola dengan gerakan protes di Way Jepara.

Dipandang dengan perspektif sejarah, Peristiwa Lampung tidak merupakan kejutan sejarah karena dalam pola, struktur dan kecenderungan tidak banyak berbeda dengan peristiwa-peristiwa gerakan protes petani yang *legio* (massal) itu. Frekuensinya masa kini jauh berkurang dan dengan pengetahuan kita mengenai sifat dan hakekatnya yang lebih luas, kiranya relatif lebih gampang juga diketemukan pendekatan yang efektif dan bijaksana selaras dengan etos Bangsa Indonesia.⁶

Selain menegakkan harmoni kehidupan, sejarah juga bertanggungjawab atas terjaganya kohesivitas sosial. Sejarah memiliki kewajiban ikut mendorong semua lapisan masyarakat untuk menjunjung tinggi berbagai kesepakatan publik yang telah dicapai. Melalui eksplanasi diakronisnya, sejarah memiliki kesempatan luas untuk meninjau secara kritis berbagai kesepakatan publik, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kebanggaan rasional untuk mengikuti sistem yang berlaku.

2.2.3 Ilmiah

Dilihat dari genetika historis, sebetulnya sasaran ilmiah bukan merupakan kodrat eksplanasi sejarah. Pada awalnya sasaran rekonstruksi sejarah hanya ada dua, yaitu kultural dan sosial. Sasaran ilmiah merupakan sasaran kultural masyarakat Eropa. Sasaran itu melekat dalam diri penjelasan sejarah terjadi ketika kebudayaan Eropa (pada masa kini juga dikenal sebagai kebudayaan Barat) mendominasi

dunia dan berbagai aspeknya ditempatkan sebagai ukuran kebenaran universal. Oleh karena kebudayaan Eropa antara lain menempatkan obyektivitas, rasionalitas dan empirisme sebagai kriteria kebenaran, maka sejarah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan menempatkan ketiganya sebagai sasaran. Untuk mencapai sasaran ilmiahnya, yaitu penjelasan sejarah yang obyektif, rasional dan didukung dengan bukti-bukti empiris, ilmu sejarah mengembangkan berbagai cara yang terangkum dalam metode sejarah.

Pada prosedur normal, seorang sejarawan akademis akan memulai penjelasannya tentang peristiwa masa lampau dengan menentukan topik dan merumuskan permasalahan yang akan dikaji. Tahap selanjutnya sejarawan akan berusaha mengumpulkan bukti-bukti empiris, baik berupa artifak maupun mentifak, dengan berbagai cara. Setelah melakukan seleksi sumber untuk memilih bukti-bukti empiris yang signifikan, sejarawan akan melakukan kritik sumber dengan tujuan agar validitas bukti dapat terjamin. Pada berbagai buku metode sejarah, kritik sumber dilakukan dengan dua cara, yaitu intern dan ekstern. Dewasa ini kritik kebudayaan pembuat sumber semakin memperoleh perhatian yang cukup untuk menjadi kritik sumber yang ketiga. Dengan memahami pola pikir dan pola tindak atau konstruk mental pembuat sumber, sejarawan akan memahami maksud kata perkata yang disampaikan sumber, sehingga terhindar dari kesalahan pemaknaan saat pembacaan sumber. Konstruk mental seorang polisi akan berbeda dengan wartawan ketika menyampaikan suatu peristiwa. Hal itu juga berlaku pada dokumen-dokumen yang dibuat oleh pejabat Belanda saat menjajah Indonesia, karena dokumen itu akan menjadi “Indonesia menurut kaca mata kebudayaan Belanda”.

Tahap-tahap berikutnya adalah analisis, interpretasi dan rekonstruksi.⁷ Pada tahap analisis, sejarawan memilah-milah data sesuai permasalahan yang diajukan dan menemukan hubungan atau kaitan antar data. Untuk menginterpretasi rangkaian data yang telah dianalisis, sejarawan akademik memiliki tiga pilihan, yaitu pemaknaan dari luar yang dikenal dengan sebutan *Covering Law Model*, pemaknaan dari dalam atau *verstehen* dan *narrativisme*.⁸ Pemaknaan menggunakan *Covering Law Model* (CLM) mengasumsikan bahwa tindakan manusia dipayungi oleh pola-pola umum atau hukum perilaku

manusia. CLM yang memperoleh popularitas pada pertengahan abad XX masuk ke Indonesia berkat jasa Sartono Kartodirdjo yang memberi nama pendekatan multidimensional dan metode interdisipliner⁹ atau kemudian lebih dikenal sebagai Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial¹⁰. Kuntowijoyo memberikan berbagai contoh penggunaan teori-teori dan konsep Ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan peristiwa sejarah.¹¹

Berbeda dengan CLM, pemaknaan dari dalam berusaha memahami jalan pikiran pelaku sejarah, sehingga mampu menjelaskan tindakan historis dari perspektif pelaku. Pemahaman tersebut dilakukan melalui proses pembacaan terhadap teks dan konteks yang terkait pada pelaku sejarah. Dewasa ini, pemaknaan dari dalam dikenal dengan nama hermeneutika dan semiotika.

Narrativisme adalah eksplanasi sejarah yang berbentuk kisah. Permasalahan yang dikaji biasanya terbatas pada apa, siapa, kapan dan bagaimana suatu fenomena historis terjadi. Semenjak dominasi eksplanasi sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam ilmu sejarah di Indonesia, *narrativisme* terpinggirkan karena dipandang kurang mampu menjelaskan. Dewasa ini *narrativisme* kembali memperoleh popularitas setelah beberapa dasawarsa tenggelam oleh dominasi CLM, dengan alasan lebih murni atau tidak banyak mengandung bias interpretasi.

Tahap terakhir adalah rekonstruksi, yaitu penuangan hasil interpretasi yang telah dilakukan oleh sejarawan dalam bentuk tulisan atau media lainnya.

2.3 Meninjau Kritik terhadap Historiografi Indonesia

Pada bagian ini, peninjauan terhadap historiografi Indonesia terutama difokuskan pada kritik yang muncul akhir-akhir ini, khususnya dari Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam. Telah diawali sebelumnya bahwa kritik Bambang Purwanto ditujukan terutama pada kebenaran eksplanasi sejarah ditinjau dari sejarah obyektif yang direkonstruksi oleh sejarawan. Apabila digunakan kriteria di atas, kritik tersebut dapat dikategorikan pada sasaran ilmiah. Sinyalemen terjadinya simplifikasi eksplanasi sejarah sangat mungkin benar, apabila tahap-tahap metode sejarah tidak diikuti dengan baik.

Bukan rahasia lagi di kalangan sejarawan akademik, bahwa landasan teori sudah ditentukan pada saat tingkat perencanaan atau persiapan penelitian. Fenomena ini terjadi sejak *Covering Law Model* atau yang di Indonesia populer dengan nama pendekatan ilmu-ilmu sosial memperoleh posisi terhormat. Dengan kata lain, dalam pendekatan ilmu-ilmu sosial, sangat terbuka kemungkinan bagi seorang sejarawan untuk menentukan landasan teori yang hendak digunakan bersamaan dengan saat penentuan topik, meski belum mengumpulkan data. Langkah terbalik ini akan mampu mengefisiensi banyak hal, antara lain jumlah data yang harus dikumpulkan. Ketika seorang sejarawan sudah menentukan untuk menggunakan pendekatan ekonomi, maka berbagai data yang tidak masuk pada kategori ekonomi, meski seandainya memiliki signifikansi tinggi terhadap peristiwa sejarah yang diteliti, tidak dipilih untuk dikumpulkan. Dari sudut pandang ini, seleksi sumber sebenarnya sudah dilakukan bersamaan dengan pengumpulan sumber. Bahkan terbuka kemungkinan bagi sejarawan untuk menyingkirkan berbagai sumber yang memiliki signifikansi tinggi, sesuai dengan permasalahan yang diajukan, tetapi tidak cocok dengan landasan teori yang telah dibangun. Dengan kata lain, seleksi sumber tidak hanya terbatas pada faktor signifikansi sumber dengan peristiwa sejarah yang diteliti, tetapi juga kecocokan dengan landasan teori yang dibangun saat membuat rancangan penelitian. Penentuan landasan teori pada tahap paling awal juga mempermudah pelaksanaan analisis, karena alur analisis telah diberikan oleh ilmu-ilmu sosial. Sejarawan pada tahap ini lebih banyak disibukkan dengan kerja kategorisasi sumber ke dalam alur pemikiran landasan teori.

Seleksi sumber berdasarkan pendekatan yang digunakan serta kecocokan dengan teori yang diterapkan akan memungkinkan terjadinya simplifikasi fenomena historis. Meskipun demikian, langkah tersebut bukan merupakan kesalahan. Alasan yang dapat digunakan adalah bahwa fenomena historis merupakan realitas yang kompleks dan tidak mungkin dikaji dalam satu dua penelitian. Dengan menyadari berbagai keterbatasan yang dimiliki sejarawan, pemilihan satu aspek kajian merupakan langkah yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Alasan lain yang realistis bahwa prosedur pengajuan proposal penelitian sejarah, baik pada level

S-1, S-2 maupun S-3, harus menyertakan landasan teori. Oleh karena itu, selain tidak salah, penggunaan pendekatan dan landasan teori sejak awal tersebut juga legal.

Kritik Bambang Purwanto bahwa historiografi Indonesia semakin menjauh dari sejarah obyektif perlu ditanggapi dengan jernih. Dari aspek metodis dan metodologis, kebenaran rekonstruksi sejarah tidak diletakkan pada aspek obyektivitas dalam arti kesamaan antara eksplanasi dengan peristiwa. Kajian filosofis menunjukkan bahwa obyektivitas tidak dapat digunakan sebagai ukuran dalam ilmu sejarah, karena peristiwa yang dikaji oleh sejarawan sudah hilang dan tidak mungkin dihadirkan kembali. Perbandingan antara obyek yang diteliti dengan hasil penelitian tidak dapat dilakukan. Ketidakmungkinan untuk mengukur obyektivitas penjelasan sejarah bukan berarti dalam ilmu sejarah tidak terdapat alat untuk mengukur kebenaran eksplanasi. Pengukuran kebenaran sejarah tidak dilakukan dengan membandingkan antara eksplanasi dan peristiwa sejarah, tetapi melalui pengukuran pada aspek koherensi dan korespondensi.¹² Penjelasan sejarah dinilai benar apabila uraiannya koheren dengan kebenaran-kebenaran yang telah disepakati oleh umum, khususnya hasil kajian kaum cerdik pandai. Sedangkan menurut teori korespondensi kebenaran eksplanasi sejarah ditentukan oleh kesesuaian antara penjelasan sejarah dengan “kenyataan”. Sengaja kata kenyataan ditulis dalam tanda petik, karena kenyataan yang sebenarnya sudah hilang dan tidak lagi dapat dihadirkan kembali. Dari sudut pandang ini “kenyataan” adalah menurut perkiraan sejarawan yang pikirannya dipenuhi dengan berbagai kebenaran umum (common sense dan teori). Dengan berlandas teori koherensi dan korespondensi, kiranya dapat diambil pemahaman bahwa: *penjelasan sejarah diyakini benar apabila didukung dengan bukti-bukti empiris yang kuat dan alurnya sesuai dengan kebenaran umum (common sense dan teori)*. Untuk membuat kebenarannya semakin meyakinkan, penyampaian penjelasan sejarah harus konsisten dan mengandung korelasi antar bagian-bagiannya.

Dengan kemustahilan obyektivitas sebagai ukuran kebenaran hasil rekonstruksi sejarah, kritik keterjebakan historiografi Indonesia dalam kondisi yang semakin jauh dari sejarah obyektif tidak dapat diarahkan pada sasaran aspek metodis dan metodologis yang

digunakan oleh sejarawan Indonesia. Kritik tersebut lebih tepat apabila ditempatkan pada sasaran etika keilmuan. Dalam bahasa yang berbeda, kritik tersebut hendak menyatakan bahwa sejarawan Indonesia kurang memiliki *curiosity* dan komitmen yang tinggi terhadap ilmunya. Apabila hal itu terjadi, sekali-kali bukan merupakan kesalahan yang harus ditangani. Seperti telah disinggung pada awal pembahasan bagian ini, yaitu bahwa sasaran ilmiah lahir dari kebudayaan Eropa yang mendasari pendidikannya dengan *Trivium* dan *Quadrivium*.¹³ Pertanyaannya adalah seberapa banyak sejarawan Indonesia yang melalui pendidikan *Trivium* dan *Quadrivium*? Dengan menghitungnya secara hati-hati, kiranya kita akan dapat memahami apabila banyak terjadi deviasi dan distorsi dalam historiografi Indonesia apabila dilihat dari kacamata historiografi Eropa.

Pertanyaan tentang pendidikan *Trivium* dan *Quadrivium* itu sekali-kali bukan dimaksudkan untuk merendahkan kemampuan sejarawan Indonesia, tetapi ingin menyatakan bahwa ada banyak hambatan *socio-cultural* yang menghadang sejarawan Indonesia sehingga mustahil untuk menjadi berjiwa sejarawan Eropa. Pertanyaan yang mungkin kita renungkan bersama adalah perlu dan bermanfaatkah kita mendidik calon sejarawan Indonesia menjadi beretika keilmuan sejarawan Eropa? Tidak mampukah Masyarakat Sejarawan Indonesia membangun etika keilmuan yang khas bagi sejarawan Indonesia?

Terhadap kritik Asvi Warman Adam yang menyorot tentang ketidaklengkapan dan ketidakberimbangan eksplanasi yang terdapat pada Sejarah Nasional Indonesia jilid I – VI, kiranya perlu ditanggapi dengan terbuka. Realitas bahwa dari edisi pertama sampai terakhir banyak kekurangan perlu diakui dan pembenahan berkala bukan merupakan aib yang harus membuat malu para penyusunnya. Meskipun demikian, perlu disadari bersama pula bahwa menyusun Sejarah Nasional untuk bangsa Indonesia yang memiliki banyak etnis juga tidak mudah. Keterjebakan pada Jawa sentris perlu dengan sadar dihindari, meski sulit untuk dipungkiri bahwa sejak jaman penjajahan berbagai peristiwa yang dapat terekam dalam dokumen, sebagian besar tentang Jawa.

Keberadaan etnis Tionghoa yang tidak dijelaskan pada sejarah nasional Indonesia, seandainya memang merupakan kesengajaan, perlu dilakukan secara terbuka dan diberi alasan yang masuk akal. Hal yang sama juga berlaku terhadap etnis Hadrami. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkannya, kedua etnis tersebut perlu diberi porsi yang memadai pada sejarah nasional Indonesia, sehingga peran masing-masing dalam sejarah Indonesia dapat dipahami bersama.

Tentang sejarah korban yang digagas oleh Asvi sebagai simbol perlunya keberimbangan porsi antara ekplanasi tentang pihak pemenang dan pihak yang kalah, kiranya sulit untuk diterapkan pada sepanjang periode sejarah Indonesia. Hampir tidak mungkin, untuk tidak mengatakan mustahil, merekonstruksi sejarah korban kebijakan Daendel dan Raffles ketika menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia. Dari sudut pandang ini, sejarah korban akan mungkin direkonstruksi apabila pihak-pihak yang menjadi korban masih hidup. Dengan kata lain, rekonstruksi sejarah korban dapat dilakukan terutama pada masalah-masalah kontemporer atau bahkan peristiwa-peristiwa aktual yang kontroversial.

Meskipun banyak keterbatasan yang dimiliki oleh sejarah korban, berbagai usaha untuk membangun rekonsiliasi nasional antara para bekas tahanan politik 1965 dengan masyarakat Indonesia pada umumnya yang dilakukan oleh penggagas sejarah korban bersama kelompoknya patut diapresiasi tinggi, meski tetap terbuka lebar kemungkinan untuk tidak setuju dengan cara yang mereka tempuh. Usaha membangun rekonsiliasi tersebut menjadikan eksplanasi sejarah memiliki relevansi dengan dan ikut menyumbang solusi pada problem aktual masyarakat.¹⁴ Banyak problem aktual lain yang dihadapi bangsa Indonesia membutuhkan peran sejarawan, seperti konflik antar suku dan berkembangnya Peraturan Daerah (Perda) Syariat.

Sejarah korban sebagai genre baru dalam ilmu sejarah dari aspek historiografis merupakan fenomena yang menarik. Apabila dilihat dari tiga kriteria di atas, sejarah korban merupakan kritik terhadap kecenderungan historiografi Indonesia yang kurang, bahkan tidak, memperhatikan sasaran sosial eksplanasi sejarah. Tidak ditunaikannya

sasaran sosial dengan baik oleh eksplanasi sejarah mengakibatkan terjadinya banyak perilaku menyimpang dalam masyarakat, baik di kalangan elit maupun rakyat biasa. Bahkan pada tingkat ekstrim, penyimpangan berkembang sampai melahirkan kehendak untuk meruntuhkan Republik Indonesia.

Meski obyek kajian terbatas pada fenomena historis kontemporer, bahkan berfokus pada peristiwa 1965, kemunculan sejarah korban memberi kesadaran akan pentingnya sasaran sosial. Eksplanasi sejarah tidak hanya berkewajiban menunaikan tanggungjawab ilmiah, tetapi juga sudah seharusnya memenuhi tanggungjawab sosial, yaitu ikut memecahkan problem-problem aktual masyarakat Indonesia. Topik-topik kajian sejarah sudah selayaknya mempertimbangkan unsur relevansi dengan masyarakat kontemporer, sehingga masyarakat masa kini merasa memiliki ikatan batin dengan masyarakat masa lampau.

Permasalahan yang terdapat pada sejarah korban adalah apakah pemojokan dan penganiayaan yang diterima oleh para korban, harus dieksplanasi dengan menampilkan penderitaan para korban beserta fakta-fakta lain yang memojokkan dan menganiaya para pemenang? Apabila eksplanasi sejarah yang diproduksi hanya berisi fakta-fakta yang memojokkan Orde Baru, tidaklah salah kekhawatiran sementara sejarawan aliran lain bahwa sejarah korban hanya akan melahirkan eksplanasi balas dendam dan pelestarian konflik.

Kajian-kajian lebih akhir tentang PKI dan pembunuhan massa yang terjadi mendorong tidak hanya demitologisasi lebih lanjut terhadap sejarah resmi, tetapi lebih jauh lagi semakin mengkristalisasi *historical resentment*, jika tidak *historical revenge*. Bahkan dalam masyarakat kelihatan berkembang semacam “vigilanteisme” terhadap sejarah.¹⁵

Dengan kata lain, relevansi yang dimiliki oleh model eksplanasi sejarah korban bukan untuk menegakkan kohesivitas sosial, tetapi melestarikan konflik yang mengarahkan masyarakat pada kehancuran sosial.

Selain kemungkinan eksplanasi sejarah terjebak pada nuansa balas dendam, permasalahan lain yang dimiliki sejarah korban adalah eksplanasinya yang didominasi oleh kemalangan masyarakat Indonesia, baik berupa kecurangan para pemimpin maupun derita

rakyat kecil. Dipandang dari sudut ideologi perubahan, memang eksplanasi tentang kemalangan tersebut akan dapat menjadi cermin agar di masa mendatang, agar masyarakat terus-menerus berusaha untuk tidak akan mengulanginya lagi serta membangun kehidupan yang lebih baik di masa datang.

Perasaan malu terhadap bagian sejarah yang nista dan pahit itu, bahkan semestinya dapat ditumbuhkan sebagai sebuah kewajiban. Karena, perasaan malu itu selain sangat manusiawi, juga dapat mendorong tumbuhnya kebijakan (*wisdom*) kepada manusia lain, bahwa is dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari sejarah yang memalukan itu dan untuk selanjutnya berusaha mengarahkan perjalanan sejarah di masa kini dan masa datang...

... jangan pernah melupakan masa silam dan sejarah yang pahit, tetapi pada saat yang sama ia juga harus berusaha mengatasi kepahitan itu dengan mentransformasikan maknanya melalui penciptaan masa depan yang didasarkan pada keadaban (*civility*) di antara mereka yang pernah menjadi korban-korban sejarah dengan para pelaku kenistaan sejarah.¹⁶

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kajian manajemen menunjukkan bahwa kemajuan atau perkembangan dapat diperoleh apabila manusia mampu menganalisis dengan tepat kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threat*).¹⁷ Apabila perhatian hanya difokuskan pada kelemahan-kelemahan yang dimiliki, gambaran untuk masa kini dan masa depan sebagian besar, bahkan mungkin keseluruhan, hanyalah tentang ancaman. Akibatnya berbagai peluang menjadi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Seajar dengan kajian manajemen tersebut, eksplanasi sejarah yang hanya memfokuskan pada peristiwa yang oleh Azyumardi Azra disebut kenistaan sejarah, akan menjadikan berbagai kesempatan untuk meraih prestasi masa kini dan kecemerlangan masa depan tidak dapat dimanfaatkan.

Selain kajian manajemen, kajian psikologis memberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa kemajuan terutama ditentukan oleh kesadaran akan potensi diri, bakat, dan kekuatan diri, sehingga memungkinkan terbentuknya *selfesteem*.¹⁸ Dari sudut pandang ini, eksplanasi sejarah yang didominasi oleh kelemahan masa lampau sangat sulit untuk dapat efektif mendampingi masyarakat masa

kini dalam meraih kemajuan. Sebaliknya, sejarah akan menjadi panduan efektif dan inspiratif bagi masyarakat dewasa ini apabila mampu mengeksplanasi tentang potensi diri, bakat dan kekuatan masyarakat yang menjadikan mereka percaya diri dalam mengatasi problem-problem yang muncul.

Catatan

- ¹ Lihat Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesia?!*. Yogyakarta: Ombak, 2006, terutama bagian I. Bandingkan dengan pidato guru besarnya “Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otokritik” yang diterbitkan pada Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam, *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta, Ombak, 2005.
- ² Pemikiran Asvi tentang historiografi terutama terdapat pada “Pelurusan Sejarah dan Historiografi Alternatif”, *ibid.*
- ³ Sartono Kartodirdjo, *Sejak Indische sampai Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2005, hlm. 114-115.
- ⁴ <http://www.xenohistorian.faithweb.com/index.html>
- ⁵ Bambang Purwanto membahas permasalahan ini dalam satu bab penuh untuk mencoba meyakinkan bahwa sumber lisan tidak lebih rendah dari pada sumber tertulis. Lihat Bambang Purwanto, *op cit.*, Bagian 2.
- ⁶ Sartono, 2005, *op cit.*, hlm. 30
- ⁷ Pada berbagai buku metode sejarah, analisis dan interpretasi disatukan sebagai tahap interpretasi. Menurut penulis, antara analisis dan interpretasi perlu dipisahkan karena memiliki sistem kerja yang berbeda. Analisis berkonsentrasi pada pemilahan data dan penemuan relasi antar data, sedang interpretasi pada penyatuan semua data menjadi satu kesatuan yang utuh. Pemisahan semakin tampak diperlukan apabila sumber sejarah yang digunakan adalah data kuantitatif yang membutuhkan analisis statistik.
- ⁸ Ketiganya dibahas secara padat dan menarik pada F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah*. Terjemahan Dick Hartoko, Jakarta: Gramedia, 1987, bab VIII dan IX.
- ⁹ Lihat pada Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia, 1982. Pemikiran Sartono Kartodirdjo tentang pendekatan multidimensional dan metode interdisipliner dapat disimak terutama pada Bagian Kedua.
- ¹⁰ Penamaan Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial terutama sejak diterbitkannya buku Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1992. Secara esensial pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial sama dengan Pendekatan Multidimensional dan Metode Interdisipliner.

- ¹¹ Lihat Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 2005, Bab 7, hlm. 108 – 125.
- ¹² F.R. Ankersmit, *loc cit*.
- ¹³ *Trivium* adalah mata kuliah wajib yang terdiri dari *Grammar* (Tata bahasa, teknik berolah bahasa), *Logic* (Logika, teknik berolah pikir), dan *Rhetoric* (Retorika, teknik mengarahkan pendapat orang lain). Pada masa-masa kemudian *Trivium* berkembang menjadi *Liberal Art* yang merupakan mata kuliah-mata kuliah wajib bagi mahasiswa baru S-1 (*undergraduate*). Pada Abad Pertengahan ketiganya merupakan prasyarat untuk mengambil *Quadrivium* yang terdiri *arithmetic*, *geometry*, *music*, dan *astronomy*. Keempatnya merupakan prasyarat untuk mengambil studi filsafat atau teologi.
- ¹⁴ Salah satu usaha yang menonjol dalam meyumbang solusi bagi kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini dari pendukung sejarah korban adalah lahirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
- ¹⁵ Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramedia, 2002, hlm. 99.
- ¹⁶ *Ibid.*, hlm 108 – 109.
- ¹⁷ Analisis SWOT adalah strategi perencanaan yang secara umum digunakan untuk membuat keputusan dalam rangka meraih suatu tujuan. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey dari Stanford University. Lihat pada <http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT-analysis.html>
- ¹⁸ Kajian teori selfesteem dengan sangat menarik diberikan oleh Mark Rubin dan Miles Hewstone, “Social Identity Theory’s Self-Esteem Hypothesis: A Review and Some Suggestions for Clarification” yang terdapat pada jurnal *Personality and Social Psychology Review*, Vol. 2, No. 1.4042, tahun 1998. Download pada 20 April 2007 dari http://72.14.235.104/search?q=cache:gXrWyTb5JkJ:intl-gpi.sagepub.com/cgi/external_ref%Faccess_num%3D10.1207/s1532797/pspr.